

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, penelitian ini menjelaskan tentang Evaluasi Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2013-2015. Dengan melihat pada instrumen-instrumen Anggaran Berbasis Kinerja, yakni: target kinerja, tolok ukur kinerja, Analisis Standar Belanja, Standar Satuan Harga dan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Berdasarkan hasil penelitian telah ditemukan bahwa:

- a. Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja sebagai suatu sistem penganggaran yang berfokus pada hasil yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan dalam pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur belum sepenuhnya menerapkan instrumen-instrumen yang ada dalam Anggaran Berbasis Kinerja. Dalam penerapannya Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur baru menerapkan instrumen target kinerja, tolok ukur kinerja, standar satuan harga dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- b. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerahnya Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur masih menggunakan Standar Satuan Harga untuk pelaksanaan pengelolaan kegiatan-kegiatan belanjanya dan belum menerapkan Analisis Standar Belanja sebagai pengelolaan keuangan daerah.

- c. Dengan penggunaan instrumen-instrumen Anggaran Berbasis Kinerja tersebut pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah dapat dikatakan baik. Dan dalam penggunaan Standar Satuan Harga yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai instrumen pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sudah baik, efektif dan efisien dalam hal pembiayaan barang setiap unit. Namun dalam penerapannya, pembelian barang yang dilakukan/penetapan harga barang yang akan dibelanjakan berpatokan pada kisaran harga terendah dan tertinggi dari harga yang ada dipasaran. Dan dari proses pengelolaan anggaran belanjanya pun belum optimal, karena dari realisasi kegiatan belanja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak mencapai target anggaran belanja yang ditetapkan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang diajukan adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengenai penggunaan instrumen-instrumen Anggaran Berbasis Kinerja yang telah diterapkan dalam proses pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan sudah dapat dikatakan baik, efektif dan efisien dengan penggunaan instrumen-instrumen Anggaran Berbasis Kinerja yakni : target kinerja, tolok ukur kinerja, Standar Satuan Harga dan Standar Pelayanan Minimal. Maka diharapkan agar dalam proses pengelolaan keuangan daerah ini dapat dipertahankan.

b. Disarankan agar dalam proses pengelolaan keuangannya Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menerapkan Analisis Standar Belanja sebagai instrumen pengelolaan keuangan daerahnya, agar dapat memperbaiki kinerja pengelolaan keuangannya dan dapat terkontrol dengan baik. Mengingat bahwa Analisis Standar Belanja mempunyai makna sebagai instrumen untuk menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan. Dan dengan penerapan Analisis Standar Belanja ini diharapkan agar pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat lebih ekonomis, efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hafis Tanjung, 2010. *Akuntansi Pemerintah Daerah: Konsep dan Aplikasi*. Alfabeta, Bandung.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Penerbit. Erlangga: Jakarta.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akunntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi, Jakarta, Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul & Theresia Damayanti. 2007, *Pengelolaan Keuangan Daerah Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Kedua, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Kawedar, Warsito dkk, 2008. *Akuntansi Sektor Publik*, Semarang UNDIP.
- Mahmudi, 2006. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Penerbit: Erlangga, Yogyakarta.
- Mahmudi, 2011. *Manajemen Keuangan Daerah*, Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo, 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta. Penerbit. Andi.
- Permendagri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Robinson, Last. 2009. *Model Dasar Penganggaran Berbasis Kinerja*. Catatan Teknis dan Munual. Dana Moneter Internasional. Washington
- Rosjidi. 2001. *Akuntansi Sektor Publik Pemerintah : Kerangka, Standard dan Metode*. Surabaya : Aksara Satu
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Undang-undang No. 17 Tahun 2003 *Tentang Keuangan Negara*.
- Undang-undang No. 32 dan 33 Tahun 2004 *Tentang Keuangan Negara*.